

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan sepuluh tahapan CBM, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor atau pelaku utama dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo. Secara formal, proses pengelolaan HKm di Kulon Progo telah sesuai dengan tahapan CBM meskipun ada beberapa kegiatan dalam tahap-tahap tersebut yang berulang karena dilakukan secara informal.
2. Analisa Jejaring Sosial menunjukkan hubungan antar *stakeholder* yang ada di dalam jejaring HKm Kulon Progo bersifat timbal-balik (*Graph Type*) dengan penyebaran informasi yang baik karena durasi waktu yang cepat (*Geodesic Distance*). Skor *Density* 0,56 menggambarkan kepadatan hubungan di dalam jejaring yang menunjukkan kerjasama yang terjadi antar *stakeholders* di dalam CBNRM HKm Kulon Progo cukup tinggi.
3. Komunitas Lingkar HKm merupakan aktor yang paling besar perannya dalam CBNRM HKm Kulon Progo karena memiliki skor tertinggi dari hasil pengukuran metrik *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, dan

Eigenvector Centrality. Sedangkan stakeholder yang merupakan Betweenness Centrality adalah Dishutbun DIY. Selain kedua pihak tersebut, LSM dan akademisi (PKHR) juga memiliki peran signifikan dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo.

2. Saran

a) Saran Untuk Masyarakat Pengelola HKm

Proses untuk mendapatkan ijin pengelolaan atau IUPHKm cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat pengelola HKm yakni KTH-KTH HKm dan terkhusus komunitas Lingkar HKm, mampu memanfaatkan ijin tersebut dengan melakukan pengelolaan HKm secara optimal. Pengelolaan dilakukan tetap sesuai dengan koridor regulasi yang ada dan tetap berupaya mencapai kesejahteraan melalui skema HKm. Masyarakat harus tetap mempertahankan komitmen dalam mengelola HKm dengan prosedur yang ada dan tidak meninggalkan aspek perlindungan keanekaragaman hutan dan mendukung fungsi hutan. Apabila mengalami kesulitan atau kendala di dalam pengelolaan HKm, masyarakat dapat melakukan audiensi dengan berbagai pihak termasuk anggota legislatif yang diharuskan mampu menyerap aspirasi masyarakat Kulon Progo pada umumnya, dan para pengelola HKm pada khususnya.

b) Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah bukan merupakan aktor utama di dalam kebijakan HKm, akan tetapi pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan HKm. Pemerintah semestinya melakukan deregulasi dalam kebijakan HKm. Selama ini aturan pemanfaatan hutan tidak dibedakan antara aturan untuk masyarakat maupun untuk perusahaan. Padahal dari segi SDM maupun peralatan, masyarakat jelas berbeda dengan skala perusahaan. Namun persyaratan yang diberikan sama antara masyarakat dengan perusahaan. Hal tersebut memberatkan masyarakat. Apabila pemerintah tidak melakukan deregulasi dan hendak mempertahankan aturan atau regulasi yang ada, maka pemerintah harus bersedia menyediakan bantuan SDM dan peralatan untuk melakukan kegiatan persiapan panen kayu. Termasuk dalam *input* data ke dalam sistem informasi. Karena KTH-KTH pengelola HKm khususnya KTH hutan produksi mengalami kesulitan yang tinggi ketika dihadapkan pada proses persyaratan memanen hasil kayu. Selain itu pemerintah juga sebaiknya dapat membantu KTH-KTH mengatasi kendala dalam pengelolaan HKm seperti kendala regenerasi dan pemasaran produk. Karena pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya untuk membantu petani hutan.